



**PENEGAKAN HUKUM ATAS KEGIATAN
ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA**

TESIS

SAEFUDIN ZUHRI

2110622036

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2023



**PENEGAKAN HUKUM ATAS KEGIATAN
ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

SAEFUDIN ZUHRI

2110622036

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SAEFUDIN ZUHRI

NIM : 2110622036

Tanggal : 15 Agustus 2023

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



SAEFUDIN ZUHRI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAEFUDIN ZUHRI

NIM : 2110622036

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penegakan Hukum atas Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia" Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan



SAEFUDIN ZUHRI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

TESIS

PENEGAKAN HUKUM ATAS KEGIATAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN
INDONESIA

SAEFUDIN ZUHRI

2110622036

Telah disetujui untuk Ujian Tesis

Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH.
NIDN. 0330087001

Jakarta, Juli 2023
Mengesahkan,

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH., MH. Tr. Adm
NIP. 199304282022031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Saefudin Zuhri

Nim : 2110622036

Program Studi : Program Studi Hukum Program Magister

Judul Tesis : Penegakan Hukum atas Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Dr. Handar S.B, SH., MH., M.Tr. Adm.Kes.
Ketua Penguji

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H, LL.M.
Penguji/Pembimbing I

Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.
penguji/Pembimbing II



Dr. Saefudin Zuhri, SH., LL.M.
Ditanda

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 31 Juli 2023

Dr. Handar S.B, SH., MH., M.Tr. Adm.Kes
Ka. Prodi

PENEGAKAN HUKUM ATAS KEGIATAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

SAEFUDIN ZUHRI

Abstrak

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan pada dasarnya diarahkan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perikanan (illegal fishing). Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pelanggaran dan kejahatan. Efektifitas penegakan hukum masih kurang dikarenakan masih ada beberapa hambatan antara lain faktor substansi, struktural, sarana prasarana pendukung, masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam meminimalkan hambatan tersebut melalui beberapa strategi dalam rangka memberantas praktik ilegal fishing di perairan Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan hukum, tindak pidana, illegal fishing.

LAW ENFORCEMENT OF ACTIVITIES ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN WATERS

SAEFUDIN ZUHRI

Abstract

Illegal fishing refers to activities which contravene a state's fisheries law and regulations, or international conventions. Legal policy against fisheries offenders is basically directed at the accountability of fisheries offenders (illegal fishing). The Republic of Indonesia Law Number. 45 of 2009 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number. 31 of 2004 concerning Fisheries has regulated criminal acts (offenses) in the field of fisheries which are divided into 2 categories, namely the category of violations and crimes. The effectiveness of law enforcement is still lacking because there are still a number of obstacles, including the substance, structural, supporting infrastructure, the community and the culture of the community itself. The Indonesian government has made efforts to minimize these obstacles through several strategies in order to eradicate the practice of illegal fishing in Indonesian waters.

Keywords: Legal Policy, Criminal, Illegal Fishing.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Atas Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan Tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan izin dalam penulisan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH., MH., M.Tr., Adm. Kes. Selaku Kepala Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Suroño, SH., MH. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan selalu memberikan waktu bimbingan serta arahan selama penyusunan penulisan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen S2 Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya.
Semoga Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Jakarta, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Kerangka Konseptual.....	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	12
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	12
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	23
B. Pengertian Kesalahan, Jenis dan Unsur-unsur Kesalahan.....	25
1. Pengertian Kesalahan.....	25
2. Jenis dan Unsur-unsur Kesalahan	29
3. Macam-macam Kesengajaan	30
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan	32
2. Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Ikan.....	36
D. Pengertian dan Jenis-jenis Illegal Fishing di Indonesia.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan	41
2. Jenis-jenis <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sifat Penelitian	50
D. Analisis Penelitian	50

	<i>E. Jenis dan Sumber Data</i>	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum atas Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indonesia	52
	B. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74